



DINAMIKA KELEMBAGAAN DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANDUNG

Jamaludin¹, Rahmad Hidayat², Panti Wahyu Ningsih³

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan – Institut Teknologi Sumatera

²Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan – Institut Teknologi Sumatera

³Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer - Universitas Teknokrat Indonesia

Email: jamaludin@pwk.itera.ac.id, rahmad.hidayat@ar.itera.ac.id

Received: (22 Juni 2025)

Accepted: (22 Juni 2025)

Published : (25 Juni 2025)

Abstract

This study examines the Slum Settlement Handling Program in Tamansari Subdistrict, located in the Bandung Wetan District of Bandung City. This subdistrict faces multiple slum-related issues, including high building density, poor sanitation, and inadequate waste management. The primary focus of this research is the importance of collaboration and partnership among various institutions in implementing the “Cities Without Slums” Program (KOTAKU) to improve settlement quality. The findings show that coordination among stakeholders is still suboptimal, despite the involvement of many government agencies, the private sector, and the community. The identified obstacles include disrupted communication, overlapping authorities, sectoral ego, and the uneven involvement of the private sector and the community. This lack of coordination has led to slow progress and less-than-optimal outcomes. Some programs, such as asset management and resident relocation, have not been implemented properly. Therefore, this study recommends a clear division of roles and responsibilities among actors, enhanced cross-sector communication, and a more organized and sustainable coordination mechanism. To handle slum settlements effectively and sustainably, increased community participation is essential. This will result in more livable and healthier residential environments.

keywords : Slum Settlements, KOTAKU, Sustainability, Environment

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tamansari, yang terletak di Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Kelurahan ini memiliki berbagai masalah seperti kumuh, termasuk kepadatan bangunan, sanitasi yang buruk, dan pengelolaan limbah yang tidak memadai. Fokus utama penelitian adalah pentingnya bekerja sama dan bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk meningkatkan kualitas permukiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar pihak masih belum optimal meskipun banyak lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat telah dilibatkan. Antara hambatan yang ditemukan adalah komunikasi yang terputus, tumpang tindih kekuasaan, kebanggaan sektoral, dan kurangnya keterlibatan yang merata dari sektor swasta dan masyarakat. Kurangnya koordinasi menyebabkan proses penanganan berjalan lambat dan hasil yang kurang maksimal. Bahkan beberapa program, seperti pengelolaan aset dan relokasi warga, tidak dilaksanakan dengan baik. Rekomendasi dari penelitian ini, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar aktor, peningkatan komunikasi lintas sektor dan mekanisme koordinasi yang lebih terorganisir dan berkelanjutan. Untuk menangani permukiman kumuh secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat. Ini akan menghasilkan lingkungan permukiman yang lebih layak huni dan sehat.

Kata Kunci : Permukiman Kumuh, Kotaku, Berkelanjutan, Lingkungan

To cite this article:

Jamaludin, Rahmad Hidayat, Panti Wahyu Ningsih. (2025). Kolaborasi Penanganan Permukiman kumuh di Kelurahan taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Bandung. JurnaL SENDI Vol:6 (1); 54 - 59

PENDAHULUAN

Permukiman adalah suatu lingkup hunian yang terdiri atas lebih dari satuan rumah yang memiliki sarana, prasarana dan utilitas serta memiliki penunjang lain dalam memenuhi kebutuhan penghuninya baik di perkotaan

maupun perdesaan. Secara umum permukiman di perkotaan dibedakan menjadi dua bagian yaitu permukiman layak huni dan permukiman yang tidak layak huni atau yang biasa disebut permukiman kumuh. Permukiman layak huni biasanya dihuni oleh mereka yang memiliki ekonomi kelas menengah ke atas, sedangkan permukiman tidak layak huni atau permukiman kumuh biasanya dihuni oleh mereka yang memiliki ekonomi kelas menengah ke bawah. Permukiman kumuh merupakan kawasan hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan karena adanya ketidakteraturan dalam tata bangunan, kepadatan bangunan yang sangat tinggi, serta kualitas bangunan dan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan persyaratan. Pada umumnya, di negara-negara berkembang, kawasan perkotaan banyak ditemukan permukiman kumuh. Permukiman kumuh di kota dapat terletak di sekitar pusat kota maupun di daerah yang jauh dari pusat kota (Sukmaniar dkk1, 2020). Keberadaan permukiman kumuh di daerah perkotaan perlu menjadi perhatian semua pihak, karena setelah permukiman kumuh terbentuk, akan sangat sulit untuk dihilangkan (Hariyanto, 2010).

Kota Bandung merupakan salah satu kota cantik di Indonesia yang masih menjadi tujuan wisata bagi banyak orang. Kota Bandung dikenal akan keindahan, kesejukannya kotanya, maupun keramahan masyarakatnya. Namun dibalik keindahannya Kota Bandung masih memiliki banyak permukiman kumuh yang lokasinya tersebar di seluruh kota yang belum sama sekali ditangani oleh pemerintah maupun tertangani namun belum optimal. Kota Bandung tercatat memiliki wilayah permukiman kumuh terbesar di Provinsi Jawa Barat. Dari 151 kelurahan yang ada, sebanyak 121 kelurahan dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Berdasarkan data dari Dokumen Strategi Kawasan Hunian Kumuh Perkotaan, teridentifikasi bahwa kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung tersebar di 442 rukun warga yang berada di 33 kecamatan. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan lokasi permukiman kumuh tersebut melalui SK Walikota Nomor 648/Kep.286-distarcip/2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung. Dari klasifikasi tingkat kekumuhan yang ada, permukiman kumuh dengan kategori berat ditemukan di lima kecamatan, yaitu Astana Anyar, Bojongloa Kidul, Bandung Wetan, Kiaracondong, Cibeunying Kidul, dan Sumur Bandung. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung mencatat bahwa pada tahun 2021, luas wilayah permukiman kumuh di Kota Bandung mencapai 468,031 hektar.

Kelurahan Tamansari, yang terletak di Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dipilih sebagai lokasi studi kasus mengenai permukiman kumuh karena menghadapi masalah kekumuhan yang sangat nyata dan kompleks. Kawasan ini termasuk dalam kategori kumuh berat di Kota Bandung, dengan luas area kumuh yang mencapai lebih dari 32 hektar. Hal ini menjadikan Tamansari sebagai salah satu lokasi prioritas utama dalam berbagai program penanganan dan revitalisasi permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh pemerintah kota. Masalah utama yang dihadapi di Tamansari meliputi kepadatan bangunan yang sangat tinggi, sanitasi lingkungan yang buruk, serta sistem pembuangan air limbah dan pengelolaan sampah yang belum teratur. Bahkan, sebagian masyarakat masih membuang sampah dan limbah langsung ke sungai, terutama di bantaran Sungai Cikapundung yang melintasi wilayah ini. Kondisi ini mengakibatkan kualitas lingkungan di Tamansari sangat rendah, bahkan memiliki nilai Indeks Kualitas Tanah (IKT) terendah dibandingkan dengan kawasan kumuh lainnya di Bandung.

Dari segi indikator kekumuhan menurut regulasi pemerintah, Tamansari memenuhi hampir semua indikator utama, seperti bangunan yang tidak teratur, jalan lingkungan yang rusak, drainase yang tidak berfungsi, keterbatasan akses air minum, pengelolaan limbah dan sampah yang buruk, serta kurangnya perlindungan terhadap kebakaran. Data konkret menunjukkan bahwa ribuan rumah dan kepala keluarga terdampak oleh kondisi ini, yang semakin menegaskan tingkat kekumuhan di wilayah tersebut. Selain itu, karakteristik sosial ekonomi masyarakat di Tamansari juga memperburuk kondisi kekumuhan. Sebagian besar penghuni, terutama yang tinggal di bantaran sungai, berasal dari kelompok berpenghasilan rendah. Keterbatasan ekonomi ini membuat mereka kesulitan untuk memperbaiki kondisi lingkungan tempat tinggal mereka secara mandiri. Koordinasi dan kerjasama antar lembaga dianggap sangat penting dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tamansari, mengingat permasalahan kekumuhan yang kompleks memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang diterapkan di Tamansari menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk mengatasi isu-isu seperti kepadatan bangunan, sanitasi yang buruk, dan pengelolaan limbah yang belum teratur. Namun, proses kolaborasi tersebut belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, seperti komunikasi yang tidak lancar, koordinasi yang berjenjang, ego sektoral, dan keterlibatan sektor swasta yang belum seimbang, yang semuanya menghambat pencapaian hasil yang maksimal. Meski terdapat berbagai studi mengenai kolaborasi penanganan kumuh, sebagian besar masih berfokus pada aspek teknis atau partisipasi masyarakat. Kajian yang mendalami dinamika koordinasi antar lembaga secara lokal khususnya pada tingkat kelurahan di kota besar seperti Bandung masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bentuk, hambatan, dan potensi kolaborasi antar aktor kelembagaan dalam konteks penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tamansari, Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Permukiman kumuh merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan kota di negara berkembang, termasuk Indonesia. Permukiman kumuh ditandai oleh kepadatan tinggi, kualitas bangunan yang rendah, keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, serta lingkungan yang tidak sehat (UN-Habitat, 2010). Di Indonesia, definisi permukiman kumuh mengacu pada kondisi lingkungan hunian yang tidak layak, yang diukur berdasarkan tujuh indikator: bangunan, jalan lingkungan, drainase, air bersih, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran (Permen PUPR No. 14/2018).

Penanganan permukiman kumuh tidak dapat dilakukan secara sektoral maupun parsial, mengingat kompleksitas masalah yang terjadi. Diperlukan pendekatan kolaboratif antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Menurut Ansell & Gash (2008), kolaborasi dalam kebijakan publik memerlukan proses koordinasi, kepercayaan antar aktor, dan tujuan bersama yang jelas. Dalam konteks tata kelola perkotaan, koordinasi antar lembaga penting untuk menghindari tumpang tindih program, memastikan integrasi perencanaan, serta meningkatkan efektivitas intervensi (Agung, 2021).

Berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk mendorong kolaborasi dalam penanganan kumuh. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dengan prinsip partisipatif dan inklusif (Ditjen Cipta Karya, 2020). Dalam pelaksanaannya, keterlibatan aktif dari pemerintah kota, kelurahan, lembaga masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan. Studi oleh Fauzi & Pratama (2019) di Surabaya menunjukkan bahwa kolaborasi antar sektor secara signifikan mempercepat proses penataan permukiman melalui pembagian peran yang jelas dan mekanisme koordinasi formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang difokuskan secara intensif pada satu objek, yaitu Kelurahan Tamansari, Kota Bandung, sebagai lokasi prioritas dalam program penanganan permukiman kumuh. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam, mencakup peristiwa, aktivitas, sikap, dan pemikiran individu maupun kelompok dalam konteks kolaborasi penanganan kawasan kumuh.

Penelitian ini dilaksanakan secara daring (online), menyesuaikan dengan kondisi dan ketentuan pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. Seluruh proses pengumpulan data dan analisis dilakukan selama periode waktu yang diberikan, dengan memanfaatkan akses internet sebagai media utama. Penelusuran informasi dilakukan melalui berbagai sumber digital yang kredibel seperti jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, dan data sekunder lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang relevan dengan topik pembahasan, serta pencarian informasi daring melalui situs resmi yang kredibel guna menunjang kelengkapan data yang dibutuhkan. Karena dilakukan secara daring, tempat pelaksanaan penelitian bersifat fleksibel dan tidak terbatas pada lokasi fisik tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah

Kelurahan Taman Sari merupakan salah satu kelurahan di Kota Bandung yang menjadi wilayah prioritas dalam program Tanpa Kumuh (KOTAKU). Penetapan tersebut didasarkan pada kondisi kawasan yang termasuk dalam kategori kumuh berat, ditandai oleh tingginya kepadatan bangunan, buruknya sistem sanitasi, serta kurangnya infrastruktur dasar yang memadai. dengan luas kawasan kumuh mencapai 32,61 ha, kondisi lingkungan di Kelurahan Taman Sari sangat memerlukan perhatian khusus dan penanganan komprehensif agar dapat ditingkatkan menjadi kawasan yang lebih layak huni.

Permasalahan tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah, baik pada tingkat daerah maupun tingkat pusat. diperlukan strategi yang tepat dan terintegrasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Program KOTAKU menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjawab tantangan ini melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola lingkungan permukiman. Namun, program ini tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi lintas sektor baik dari pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat itu sendiri. komitmen yang kuat dari pemerintah harus diiringi dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun. dengan meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian masyarakat, maka perubahan menuju kawasan yang bersih, sehat, dan layak huni dapat terwujud secara berkelanjutan. Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita kota yang ramah dan inklusif bagi seluruh warganya.

Kelembagaan

Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Taman Sari melibatkan berbagai sektor dan kelembagaan yang memiliki peran penting dalam setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Kolaborasi ini dirancang agar proses penanganan kawasan kumuh dapat berjalan dengan efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain:

1. Pemerintah Kota Bandung

Sebagai pelaksana utama pada tingkat kota dan bertanggung jawab atas perencanaan strategis, alokasi anggaran, serta pengawasan program. Dalam hal ini yang termasuk dalam pihak pemerintah Kota Bandung adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Bandung, Bappelitbang (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan) Kota Bandung, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kecamatan dan Kelurahan, dan Inspektorat Kota Bandung.

2. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Sebagai pengelola program pada tingkat kelurahan dan menjadi fasilitator antara masyarakat dan pemerintah, serta melaksanakan kegiatan teknis pembangunan di lapangan dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

3. Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

Menyusun rencana kegiatan berbasis partisipasi masyarakat dan memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan lokal, serta bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun agar tetap berfungsi optimal.

Regulasi dalam Penataan Ruang

Penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Indonesia mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat, hal ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Program Kota Tanpa Kumuh. Prinsip ini menegaskan pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung, serta ikut bertanggung jawab atas keputusan yang telah dicapai bersama. Prinsip ini menjadi dasar dalam tahapan-tahapan penataan ruang dan penanganan kawasan kumuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Di Kota Bandung, komunikasi dalam penetapan kawasan kumuh masih menghadapi tantangan, sebagaimana tercantum dalam SK Walikota Nomor 648/KEP.286-Distarcip/2015. Masyarakat hanya dilibatkan pada tahap awal identifikasi, sedangkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, keterlibatan mereka masih terbatas. Hal ini menyebabkan efektivitas program belum optimal dan cakupan wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh masih cukup luas. Penataan ruang di Kota Bandung didukung oleh regulasi spasial dan aspasial sebagai berikut:

Tabel 1. Regulasi Spasial dan Aspasial

Jenis Rencana	Peraturan
Rencana Tata Ruang	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat 2022-2042
	Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2022-2042
Rencana Pembangunan (Aspasial)	Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023
	Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 648/KEP.286-Distarcip/2015

Kendala dalam Proses Kolaborasi

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Bandung bertujuan untuk menangani masalah permukiman kumuh dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Sinergi di antara mereka menjadi kunci dalam optimalisasi sumber daya, penguatan kelembagaan, serta penciptaan lingkungan hunian yang lebih layak. Namun, implementasi kerja sama ini di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang berpengaruh terhadap keberhasilan program.

a. Kendala Internal

Hambatan internal dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kota Bandung berasal dari aspek pemerintah sebagai pelaksana utama. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan, beberapa kendala yang dihadapi mencakup:

1. Kurangnya Efektivitas Komunikasi Dua Arah

Interaksi antara pelaksana program dan masyarakat belum berjalan secara optimal. Terdapat kesenjangan komunikasi, koordinasi yang masih bersifat hierarkis, serta kendala dalam penyampaian informasi secara menyeluruh. Akibatnya, pemahaman bersama dan keterbukaan dalam pelaksanaan program menjadi terbatas.

2. Ketidakseimbangan dalam Peran Pelaksana Program

Kurangnya kesetaraan serta minimnya kepercayaan antar pelaksana program, baik di antara instansi pemerintah maupun dengan mitra non-pemerintah, menyebabkan dominasi satu pihak serta rendahnya partisipasi aktif dari pihak lain. Ego sektoral masih menjadi hambatan utama yang memperlambat proses kolaborasi.

3. Kurangnya Pemahaman Lintas Sektor

Penanganan permukiman kumuh sering kali masih dianggap sebagai tanggung jawab satu sektor, padahal permasalahan ini bersifat multidimensi dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Rendahnya pemahaman bersama antar pelaksana program mengakibatkan adanya ego sektoral yang menghambat kerjasama antar dinas.

4. Belum Optimalnya Forum Komunikasi

Forum komunikasi seperti Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) yang seharusnya berfungsi sebagai wadah koordinasi, belum dapat beroperasi secara maksimal. Hal ini berdampak pada kurangnya sinergi antara para pemangku kepentingan dalam menjalankan program secara efektif.

b. Kendala Eksternal

Hambatan eksternal dalam pelaksanaan program KOTAKU berasal dari faktor di luar pemerintah, khususnya dari masyarakat dan sektor swasta. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi:

1. Minimnya Keterlibatan Sektor Swasta

Peran sektor swasta dalam upaya penanganan permukiman kumuh masih bersifat tradisional dan belum dioptimalkan sepenuhnya. Padahal, keterlibatan swasta memiliki dampak signifikan dalam hal pendanaan, inovasi, serta keberlanjutan program.

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat dan Swasta tentang Kolaborasi

Kesadaran dan pemahaman masyarakat serta sektor swasta terhadap pentingnya kerja sama dalam program ini masih tergolong rendah. Akibatnya, upaya membangun sinergi, integrasi, serta komitmen bersama dalam penanganan permukiman kumuh menjadi lebih sulit terealisasi.

Kolaborasi multipihak dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Bandung masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari dalam pemerintah maupun dari masyarakat dan sektor swasta. Kendala internal mencakup komunikasi yang belum optimal antara pelaksana program dan masyarakat, ketidakseimbangan peran di antara instansi serta mitra non-pemerintah yang menyebabkan rendahnya partisipasi, serta kurangnya pemahaman lintas sektor yang menghambat kerja sama dalam menangani permasalahan permukiman kumuh. Di sisi lain, kendala eksternal meliputi keterlibatan sektor swasta yang masih terbatas dan belum dimanfaatkan secara maksimal dalam hal pendanaan serta inovasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat dan sektor swasta tentang pentingnya kolaborasi, sehingga sinergi dan keterpaduan dalam program sulit diwujudkan.

SIMPULAN

Penanganan permukiman kumuh di Kota Bandung merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan kolaboratif antara berbagai sektor, yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Program

KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) telah menjadi upaya strategis pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menekankan prinsip kolaborasi, partisipasi, dan inklusivitas. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi kendala seperti komunikasi yang kurang efektif antar sektor, ego sektoral, serta keterlibatan sektor swasta dan masyarakat yang belum optimal.

Keberhasilan penanganan permukiman kumuh sangat bergantung pada sinergi multipihak yang mampu mengintegrasikan peran dan sumber daya masing-masing. Penguatan forum komunikasi, regulasi yang jelas, dan mekanisme koordinasi yang efektif menjadi faktor penting untuk memastikan kolaborasi berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan dukungan sektor swasta juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni dan sehat.

Dengan demikian, kolaborasi antar sektor bukan hanya sebagai strategi pelaksanaan, tetapi sebagai fondasi utama dalam mewujudkan transformasi permukiman kumuh menjadi kawasan yang lebih baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kota Bandung.

REFERENSI

- Febrion, C., Wijaya, K., & Sugandi, D. (2020). IDENTIFIKASI BANGUNAN KUMUH YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN TAMANSARI KOTA BANDUNG. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, Vol.4 No.3. file:///C:/Users/Owner/Downloads/Identifikasi_Bangunan_Kumuh_Yang_Mempeng.pdf
- Katresnal, S. D., & Adharina, N. D. (2024). Praktik baik penanganan permukiman kumuh: Partisipasi masyarakat pada program KOTAKU di Kelurahan Tamansari, Bandung. *REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 19. file:///C:/Users/Owner/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/IB4B3KLU/76717-257011-2-PB[1].pdf
- Saputra, W., Sukmaniar, & Hermansyah, M. H. (2022). PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN: PENYEBAB, DAMPAK DAN SOLUSI. *Environmental Science Journal (ESJo) : Jurnal Ilmu Lingkungan*, 1. file:///C:/Users/Owner/Downloads/ARTIKEL+2+SL.Wahyu+dkk.pdf
- Sulaiman, A. L. (2020). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bandung*. file:///C:/Users/Owner/Downloads/10-Article%20Text-92-1-10-20210427%20(2).pdf
- Syamsudin, S. (2024). Strategi DPKP dalam pencegahan dan penanganan kawasan kumuh di Kota Bandung berdasarkan pasal 26 dan 55 Perda nomor 13 tahun 2019 perspektif Siyash Dusturiyah. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/86018/>